

## **BPK Serahkan Hasil Laporan Pemeriksaan Semester II Tahun 2019**



<http://infopublik.id>

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Kalimantan Selatan menggelar acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan kinerja dan dengan tujuan tertentu serta pembukaan rekonsiliasi data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2019.

Acara tersebut dilaksanakan di Aula Kantor BPK RI perwakilan Kalsel di Banjarbaru dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Haris Makkie, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, serta bupati dan walikota seluruh kabupaten kota se Kalimantan Selatan.

Diacara tersebut BPK RI juga turut menyoroti kinerja Bank Kalsel yang dianggap mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir.

Kepada sejumlah wartawan, Kepala perwakilan BPK RI Perwakilan Kalsel Tornanda Syaifullah menyampaikan bahwa pada semester II tahun 2019 pihaknya telah mengadakan pemeriksaan dan menemukan beberapa masalah, salah satunya masalah pengelolaan kredit di Bank Kalsel, dimana pihaknya menginginkan untuk take over kredit di Bank Kalsel harus lebih selektif.

“Permasalahan lain yang ada di Bank Kalsel yakni pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) tidak didukung analisis yang memadai, pencairan KMK direalisasikan sebelum syarat pencairan dipenuhi, pemberian kredit KMK tidak didukung analisis, pemberian suplesi tidak layak, serta agunan pokok belum dipecah dan diikat sempurna,” ucap Tornanda.

Tornanda melanjutkan, bahwa Bank Kalsel perlu memperbaiki standar operasional kerja (SOP) mereka, dirinya berharap dengan adanya Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK RI, kedepan Bank Kalsel akan lebih baik.

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Abdul Harris Makkie menyampaikan, bawah Pemerintah Provinsi Kalsel akan menindaklanjuti hasil temuan BPK RI yang menunjukkan adanya permasalahan di Bank Kalsel.

“Adanya permasalahan di Bank Kalsel akan disampaikan kepada Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor untuk menindaklanjuti, dikarenakan permasalahan tersebut akan dievaluasi dan dikonsolidasi Pemprov Kalsel,” ucap Harris Makkie.

#### **Sumber Berita:**

1. <http://infopublik.id>, BPK Serahkan Hasil Laporan Pemeriksaan Semester II Tahun 2019, Selasa, 17 Desember 2019.
2. <http://abdipersadafm.co.id>, LHP Semester II Tahun 2019 Telah Diserahkan BPK RI Perwakilan Kalsel, Senin, 16 Desember 2019.

#### **Catatan:**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

#### **Pasal 4**

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
- (3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

- (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

## **Pasal 20**

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.